

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 8 No. 1 Tahun 2026

Transformasi Kebijakan Kesejahteraan
Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku,
Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi

Penulis

 Megawati Simanjuntak¹, Safira Afwa Lathifah¹

¹ Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB University

Transformasi Kebijakan Kesejahteraan Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku, Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Tingkat adopsi teknologi dan pengetahuan lingkungan yang tinggi pada generasi Z tidak serta-merta meningkatkan kepuasan hidup (*life satisfaction*), yang saat ini justru tergolong rendah.
- 2) Berbeda dengan stigma negatif yang beredar, media sosial terbukti memiliki peran positif signifikan sebagai sarana edukasi strategi penghematan bagi kaum muda.
- 3) *Frugality* (gaya hidup hemat) dan literasi keuangan digital terbukti menjadi penentu utama kebahagiaan karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri di tengah tekanan konsumerisme digital.
- 4) Perilaku hemat generasi Z didorong oleh keuntungan ekonomi langsung, bukan motif lingkungan, sehingga kampanye ekologis tanpa manfaat finansial langsung menjadi tidak efektif.
- 5) Pendekatan kebijakan saat ini masih bersifat administratif-normatif dan perlu bertransformasi menjadi intervensi berbasis perilaku (*behavioral*) yang memberikan keuntungan ekonomis nyata bagi gaya hidup berkelanjutan.

Ringkasan

Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan psikologis dan stabilitas finansial generasi Z dalam rentang usia 16 hingga 28 tahun. Studi menunjukkan bahwa meskipun kelompok ini sangat fasih secara digital namun tingkat kepuasan hidup pemuda masih tergolong rendah dan rentan terhadap tekanan finansial. *Policy brief* ini menyoroti urgensi transformasi kebijakan nasional dari sekadar perluasan akses keuangan menjadi penguatan ketahanan perilaku psikologis. Temuan riset mengindikasikan kemampuan menahan diri (*frugality*) dan rasa aman dari kejahatan siber adalah penentu utama kebahagiaan. Namun, terdapat celah karena pengetahuan lingkungan tidak secara otomatis mendorong perilaku hemat; perilaku ramah lingkungan Generasi Z sangat bergantung pada keuntungan ekonomi langsung. Dengan kata lain, motif ekonomi murni menjadi penggerak utama, sehingga kampanye lingkungan yang hanya mengandalkan imbauan moral cenderung tidak efektif dan perlu diganti dengan skema yang menawarkan keuntungan ekonomi langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomDig), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sinergi ini bertujuan menyusun aturan yang lebih adaptif, mengintegrasikan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan peran positif media sosial, serta menciptakan keuntungan ekonomi langsung. Langkah ini diperlukan untuk mencetak generasi mahir teknologi dan tangguh secara mental dan finansial.

Kata kunci: *frugality*, kebijakan perilaku, kepuasan hidup, literasi keuangan digital, manfaat ekonomi

Pendahuluan

Generasi Z saat ini memegang peranan sentral dalam ekonomi digital Indonesia, seiring dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 7,57 persen (BPS 2024). Namun, dominasi pemuda dalam penggunaan teknologi beriringan dengan kerentanan psikologis dan risiko finansial yang kompleks. Data menunjukkan bahwa generasi Z dan milenial menyumbang porsi signifikan dalam kredit macet (*non-performing loan*) pada layanan *fintech lending* (OJK 2024). Fenomena ini diperparah dengan temuan penelitian bahwa tingkat kepuasan hidup (*life satisfaction*) responden generasi Z tergolong rendah, meskipun tergolong *digital native* yang sangat fasih menggunakan teknologi finansial dan terpapar informasi lingkungan secara masif melalui media sosial.

Permasalahan ini tidak hanya mengancam stabilitas keuangan individu, tetapi juga berpotensi menghambat akumulasi aset produktif nasional jika tidak segera ditangani. Meskipun pemerintah telah memiliki kerangka regulasi seperti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), implementasi di lapangan masih menunjukkan kesenjangan pada aspek intervensi perilaku. Data OJK (2024) mengonfirmasi hal ini melalui ketimpangan antara indeks inklusi keuangan yang telah mencapai 75,02 persen dengan literasi yang baru berada di angka 65,43 persen. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa generasi Z memiliki akses terhadap produk keuangan, namun belum memiliki kapasitas perilaku, khususnya kemampuan menahan diri (*frugality*), untuk mengelolanya secara sehat yang pada akhirnya berdampak negatif pada kepuasan hidup.

Regulasi saat ini cenderung menekankan pada akses dan pengetahuan produk, padahal hasil penelitian menegaskan bahwa faktor penentu utama kebahagiaan adalah kemampuan kontrol diri (*frugality*) dan rasa aman yang dihasilkan dari literasi keuangan digital yang mumpuni. Apabila

dimensi psikologis dan mekanisme keuntungan ekonomi langsung ini tidak segera diintegrasikan ke dalam regulasi nasional, upaya peningkatan kesejahteraan generasi Z berisiko mengalami stagnasi. Konsumen muda yang merasa cemas secara finansial dan tidak melihat keuntungan ekonomi langsung dari gaya hidup ramah lingkungan akan sulit mengadopsi perilaku positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *policy brief* ini bertujuan mengusulkan integrasi materi literasi berbasis perilaku serta skema keuntungan ekonomi langsung ke dalam kebijakan nasional.

Temuan Penelitian dan Analisis Masalah

Penelitian terbaru yang menggunakan desain cross sectional study dan melibatkan 350 responden generasi Z (usia 16 sampai 28 tahun) di seluruh Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara wawasan dan tindakan pada kelompok tersebut. Meskipun memiliki pengetahuan lingkungan yang tinggi, hasil riset membuktikan bahwa pengetahuan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku hemat. Artinya, generasi Z tidak berhemat demi menyelamatkan bumi melainkan murni karena motif ekonomi untuk menjaga tabungan pribadi. Hal ini menjelaskan penyebab produk ramah lingkungan yang mahal sering kali tidak laku di kalangan pemuda. Sebaliknya faktor yang terbukti meningkatkan kepuasan hidup adalah literasi keuangan digital dan *frugality*. Dalam konteks literasi digital, aspek yang paling memberikan ketenangan hidup bukanlah kemampuan investasi rumit melainkan kemampuan dasar dalam melindungi data pribadi dari penipuan. Sementara itu *frugality* berperan sebagai rem pakem (*self-control*) yang membentengi mental pemuda dari gempuran fitur paylater dan godaan belanja impulsif.

Selain itu, penelitian terbaru ini juga mematahkan stigma negatif media sosial. Riset We Are Social (2024) mencatat bahwa dari 167 juta pengguna media sosial di Indonesia, sebanyak 47,9

persen menggunakannya untuk mencari inspirasi terkait produk dan aktivitas. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa media sosial memiliki dampak positif signifikan terhadap perilaku hemat. Generasi Z secara aktif memanfaatkan media sosial untuk mencari tips keuangan serta perbandingan harga dan strategi bertahan hidup (*life hacks*). Temuan lain yang perlu diperhatikan adalah adanya nuansa gender; laki-laki cenderung lebih unggul dalam aspek teknis sedangkan perempuan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi berkat kemampuan penerimaan diri yang lebih baik.

Dalam seluruh aspek tersebut, ketergantungan pada keuntungan ekonomi langsung tetap menjadi kunci utama. Oleh karena itu, skema yang tidak menawarkan keuntungan ekonomi langsung akan sulit mengubah perilaku keuangan mereka secara berkelanjutan.

Tinjauan Kebijakan dan Aturan Saat Ini

Aturan hukum di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu merespons perilaku unik generasi Z yang impulsif namun sensitif terhadap harga. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan yang berlaku, terdapat tiga area yang perlu diperbaiki substansinya agar lebih relevan.

Pertama, pada sektor keuangan, pemerintah memiliki Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang mewajibkan literasi keuangan. Namun aturan pelaksanaannya dalam POJK No. 3 Tahun 2023 masih terlalu fokus pada pemahaman produk seperti bunga dan denda. Selain itu, implementasi literasi oleh pelaku industri seperti bank dan *fintech* di lapangan sering kali hanya bersifat *compliance* atau pemenuhan kewajiban seremonial semata, bukan edukasi perilaku yang mendalam. Akibatnya, regulasi ini belum optimal karena tidak mewajibkan materi psikologi keuangan atau manajemen kontrol diri, sehingga generasi Z paham cara meminjam uang tetapi tidak memiliki ketahanan mental untuk menahan keinginan belanja.

Kedua, terkait mekanisme transaksi digital. Regulasi teknologi finansial seperti POJK No. 10/2022 saat ini membolehkan sistem transaksi yang serba cepat atau satu kali klik cair. Kebijakan ini dinilai belum optimal melindungi konsumen muda karena kemudahan tanpa hambatan tersebut justru memicu perilaku impulsif pada generasi Z yang terbukti memiliki kontrol diri rendah. Belum ada aturan yang mewajibkan fitur pengaman psikologis seperti jeda waktu berpikir sebelum utang disetujui.

Ketiga, regulasi lingkungan seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Permen LHK No. 75 Tahun 2019 masih bersifat himbauan moral dan berfokus pada kewajiban produsen dan penanganan di hilir. Belum ada mekanisme keuntungan ekonomi langsung yang terstruktur bagi individu yang melakukan pengurangan sampah. Ketiadaan keuntungan ekonomi langsung ini membuat perilaku ramah lingkungan menjadi pilihan yang dinilai mahal dan tidak menarik bagi generasi Z yang memiliki karakter *frugal*.

Oleh karena itu, transformasi kebijakan mendesak dilakukan dengan mengubah pendekatan dari sekadar himbauan normatif menjadi intervensi teknis yang mampu meningkatkan kesejahteraan finansial konsumen. Regulasi harus dirancang agar perilaku hemat dan ramah lingkungan secara otomatis menjadi pilihan yang paling ekonomis. Langkah konkret untuk mewujudkan transformasi tersebut diuraikan dalam rekomendasi kebijakan berikut.

Rekomendasi

Target peningkatan kesejahteraan generasi Z dan ekonomi berkelanjutan berisiko tidak tercapai jika regulasi tidak segera beradaptasi dengan realitas perilaku pemuda. Tanpa intervensi yang menyentuh aspek psikologis dan keuntungan ekonomi langsung, literasi hanya akan berhenti sebatas pengetahuan tanpa perubahan tindakan. Oleh karena itu, kementerian dan lembaga terkait disarankan untuk menempuh langkah strategis sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) perlu segera merevisi Pedoman Materi Edukasi Keuangan (SEOJK) dengan mewajibkan penyertaan modul mengenai kesehatan finansial psikologis yang mencakup strategi pengendalian diri, penundaan kepuasan, dan manajemen emosi, bukan hanya cara menggunakan produk. Selain itu, OJK harus mendorong prinsip *friction by design* pada aplikasi keuangan, terutama *paylater*, dengan mewajibkan fitur jeda transaksi (*cooling off period*), peringatan anggaran, serta simulasi dampak jangka panjang dari cicilan (total bunga dan beban bulanan) dalam format sederhana sebelum transaksi diproses. Hal ini penting untuk mengembalikan kesadaran pengguna sebelum berutang.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disarankan merancang regulasi yang menciptakan mekanisme keuntungan ekonomi ekologis, memastikan perilaku ramah lingkungan lebih murah bagi konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan diskon atau *cashback* langsung bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, serta mendorong integrasi sistem bank sampah dengan dompet digital (*e-wallet*) agar sampah dapat menjadi sumber pendapatan instan yang menarik bagi generasi Z.
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Kurikulum Merdeka perlu mengintegrasikan kurikulum "*Frugality for Sustainability*" dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Modul ini harus mengajarkan konsep bahwa "Hidup Hemat = Menyelamatkan Bumi = Menyelamatkan Uang", dengan melatih siswa menghitung keuntungan finansial riil dari gaya hidup minim sampah untuk membangun mentalitas *frugal* sejak dini.
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomDig) harus

bersinergi melakukan pengawasan ketat terhadap algoritma pemasaran media sosial yang agresif (*predatory advertising*) guna mengendalikan iklan yang menargetkan kerentanan impulsif pengguna muda. Selain itu, pemerintah perlu mendorong platform digital untuk menyediakan label atau filter konten literasi keuangan dan edukasi gaya hidup hemat yang terverifikasi. Hal ini akan memudahkan pengguna muda dalam mengakses konten positif yang mampu meningkatkan daya kritis mereka di ruang digital.

Implementasi langkah-langkah ini akan mentransformasi regulasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi katalis perubahan perilaku yang nyata, meletakkan fondasi strategis bagi lahirnya generasi emas yang tidak hanya cerdas secara digital, tetapi juga sejahtera secara mental dan finansial.

Kesimpulan

Pendekatan kebijakan saat ini dinilai masih memiliki celah fundamental karena terlalu berfokus pada aspek kognitif dan aksesibilitas, namun minim intervensi pada aspek perilaku (*behavioral*) dan motif ekonomi individu. Kelemahan utamanya terletak pada asumsi bahwa pengetahuan lingkungan otomatis melahirkan perilaku peduli, padahal riset membuktikan bahwa motif penggerak utamanya adalah keuntungan ekonomi langsung. Selain itu, narasi edukasi keuangan selama ini lebih condong mengajarkan "cara gas" (investasi dan akses pinjaman) daripada "cara rem" (kontrol diri dan *frugality*). Ketimpangan ini menyebabkan tingginya akses keuangan tidak diikuti oleh peningkatan kepuasan hidup karena generasi Z justru terjebak dalam kecemasan finansial dan pola konsumsi impulsif.

Oleh karena itu, strategi peningkatan kesejahteraan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial melalui himbuan moral semata. Regulasi harus bertransformasi menjadi instrumen yang melindungi masyarakat tidak hanya dari kejahatan

siber (eksternal), tetapi juga dari kerentanan psikologis diri sendiri (internal). Arah kebijakan pemerintah harus digeser, dari sekadar membuka akses keuangan seluas-luasnya, menjadi upaya membangun mentalitas hemat dan menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan ekonomi langsung bagi perilaku positif. Hanya dengan memadukan rasa aman, kontrol diri, dan keuntungan ekonomi langsung, visi generasi emas yang sejahtera dan tangguh dapat terwujud. Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat mengesampingkan pendekatan normatif dan merancang kebijakan yang benar benar berpihak pada perilaku serta kebutuhan riil generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik pemuda Indonesia 2024. [diakses 2025 Februari 21]. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/b2dbaac4542352cea8794590/statistik-pemuda-indonesia-2024.html>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Statistik P2P Lending Periode Juli 2024. [diakses 2025 Desember 27]. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-P2P-Lending-Periode-Juli-2024.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. [diakses 2025 Februari 21]. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-(SNLIK)-2024.aspx).
- [POJK] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat. 2023.
- [Permen] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. 2019.
- [UU] Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 2023.
- [UU] Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. 2008.
- We Are Social. 2024. *Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024*. [diakses 2025 Februari 21]. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Megawati Simanjuntak, merupakan guru besar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Beliau memiliki kepakaran dalam bidang perilaku konsumen. (*Corresponding Author*)
Email: mega_juntak@apps.ipb.ac.id



Safira Afwa Lathifah, adalah Mahasiswa S-1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.

ISSN 2828-285X



Telepon
+62 811-1183-7330



Email
dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat
Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680